

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

Novia Aminuddin¹, Srihadi Winarningsih²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: novia19003@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Karakteristik daerah mampu melaksanakan otonomi dapat dilihat dari kemampuan keuangannya yang diukur melalui analisis kinerja keuangan daerah dan tingkat kemampuan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 dengan menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja daerah sedangkan untuk mengukur kemampuan keuangan menggunakan *share and growth*, peta kemampuan daerah, dan IKK (Indeks kemampuan Keuangan). Hasil penelitian dari kinerja keuangan menunjukkan sebagai berikut: Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah yang memiliki pola hubungan konsultatif dengan rata-rata mencapai 35,54%. Rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi dengan rata-rata mencapai 70,56%. Rasio desentralisasi fiskal tergolong sedang dengan rata-rata mencapai 22,77%. Rasio efektivitas PAD tergolong efektif secara rata-rata sebesar 99,64%. Rasio efisiensi belanja daerah tergolong kurang efisien dengan rata-rata mencapai 90,90%. Hasil penelitian dari kemampuan keuangan daerah menunjukkan sebagai berikut: rasio *share* seluruh secara-secara mencapai 22,94% yang berarti peran PAD dalam membiayai belanja daerah masih sangat minim dan hasil dari rasio *growth* secara rata-rata mencapai 10,72% yang menunjukkan seluruh pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat masih rendah. Berdasarkan hasil analisis *share and growth* dalam Peta Kemampuan Keuangan, terdapat 21 daerah di Kuadran II, 10 daerah di Kuadran III, dan sisanya sejumlah 14 masuk ke dalam Kuadran IV. Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) kemampuan keuangan tinggi sebanyak 13 daerah, sedangkan 13 daerah dengan kemampuan sedang dan sisanya 1 daerah berada di kemampuan rendah.

Kata kunci: pengukuran kinerja; tingkat kemampuan keuangan; otonomi daerah

Abstract

The characteristics of a region capable of implementing autonomy can be seen from its financial capacity as measured through an analysis of regional financial performance and the level of regional capacity. The purpose of this study was to determine how regional financial performance and regional financial capacity in implementing regional autonomy in the Regency / City regional government in West Java Province in the 2017-2021 fiscal year using secondary data from the Budget Realization Report (LRA). The research method used is descriptive quantitative to measure financial performance with financial ratios including the ratio of regional financial independence, regional financial dependence ratio, fiscal decentralization ratio, PAD effectiveness ratio, and regional expenditure efficiency ratio while to measure financial capability using share and growth, regional capability map, and IKK (Financial capability index). The research results of financial performance show the following: The ratio of regional financial independence is classified as low which has a consultative relationship pattern with an average of 35.54%. The regional financial dependency ratio is classified as very high with an average of 70.56%.

The fiscal decentralization ratio is classified as moderate with an average of 22.77%. The PAD effectiveness ratio is classified as effective with an average of 99.64%. The regional expenditure efficiency ratio is classified as less efficient with an average of 90.90%. Research results from regional financial capability show the following: The overall share ratio on average reached 22.94%, which means that the role of PAD in financing regional expenditures is still very minimal and the results of the growth ratio on average reached 10.72%, which shows that the overall growth of PAD in the Regency / City in West Java Province is still low. Based on the results of the share and growth analysis in the Financial Capability Map, there are 21 regions in Quadrant II, 10 regions in Quadrant III, and the remaining 14 fall into Quadrant IV. Based on the Financial Capability Index (IKK), 13 regions have high financial capability, while 13 regions have medium capability and the remaining 1 region is in low capability.

Keywords: *performance measurement; level of financial capability; regional autonomy*

Pendahuluan

Indonesia mengalami krisis ekonomi, dan situasi politik yang tidak stabil pada era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Sistem politik dan ekonomi pada masa itu dibangun begitu sangat sentralistis, yang mengakibatkan daerah tidak dapat berkembang secara optimal. Keputusan mengenai daerah selalu ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan partisipasi kepada daerah. Hal ini menyebabkan daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi lokalnya sendiri, dan akhirnya bergantung pada pemerintah pusat. Ketidakadilan distribusi sumber daya politik dan ekonomi yang dilakukan pada rezim Orde Baru berakhir menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh Pemerintahan B.J. Habibie. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang signifikan antara daerah yang lebih terpencil, dan menyebabkan daerah menjadi kurang berkembang dan kalah bersaing dengan daerah yang lebih maju. Daerah-daerah tersebut seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya politik maupun ekonomi, serta tidak dapat mengembangkan potensi daerah yang dimiliki secara optimal sehingga mengakibatkan pembangunan dan kesejahteraan daerah-daerah tersebut terhambat (Suparto, 2014).

Kelangkaan legitimasi politik membuat masyarakat memiliki banyak kesempatan untuk menuntut perubahan dalam hubungan pusat-daerah. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menuntut kebijakan otonomi daerah yang lebih luas dan akses yang lebih besar ke sumber daya alam daerah (Suparto, 2014).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon terhadap tuntutan desentralisasi yang semakin kuat yang diwujudkan melalui pengesahan dua Undang-Undang pada bulan April 1999 dan menetapkan pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah menetapkan dua Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak tahun 2001, desentralisasi secara resmi telah diimplementasikan di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi melalui program desentralisasi yang dikenal sebagai *Big Bang Decentralization* program ini ditandai dengan transfer wewenang tanggung jawab yang signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam waktu yang relatif singkat (Hamsiah, 2019).

Pemberian desentralisasi ini bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah berkaitan penguasaan atas sumber-sumber keuangan, mengurangi ketimpangan antar daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Nurhemi, 2015).

Implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tidaklah berjalan mulus hingga saat ini dan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah. Menurut (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2021) mengungkapkan “Penerapan otonomi daerah

yang dilakukan sejak 1999 yang diberikan kepada kepala daerah terpilih berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Namun hampir 25 tahun pelaksanaannya, tidak semua daerah yang diberikan otonomi mampu meningkatkan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan, banyak daerah yang justru masih sangat bergantung pada pemerintah pusat". Dari pernyataan tersebut persoalan mengenai otonomi daerah ini menjadi permasalahan serius yang perlu diatasi masing-masing daerah.

Anggaran merupakan komponen krusial dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, karena anggaran menjadi landasan alokasi sumber daya publik yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan ini tercermin dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kinerja dan kemampuan daerah dari segi pendapatan maupun pengeluaran. Untuk mewujudkan otonom daerah, pemerintah daerah dituntut untuk independen dalam hal kemampuan keuangan sehingga membuat setiap daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sumber pendapatan demi dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah.

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	Rp23.308.083.898.482,80	Rp23.319.551.898.947,00
2018	Rp21.725.321.991.527,00	Rp20.597.546.126.012,40
2019	Rp23.912.199.211.875,70	Rp22.908.062.822.178,40
2020	Rp20.454.420.759.759,50	Rp21.394.531.898.171,00
2021	Rp24.193.579.019.676,80	Rp25.018.097.836.849,30

Sumber: BPK RI-Provinsi Jawa Barat (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat dari total realisasi PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 mengalami fluktuatif. Selama lima tahun terjadi penurunan penerimaan pendapatan PAD pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (-10%) sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (-7%). Hal tersebut dikarenakan kondisi yang tidak stabil terutama pada tahun 2020 akibat kondisi *pandemic covid-19* yang menyebabkan terjadi penurunan yang signifikan terutama pada pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan PAD terbesar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat selama lima tahun pada tahun 2021 sebesar Rp25.018.097.836.849,30 sedangkan penerimaan PAD terendah pada tahun 2018 Rp20.597.546.126.012,40.

Salah satu persoalan yang sering dihadapi dalam menjalankan otonomi daerah yaitu usaha daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dari sumber daya keuangan yang diberikan untuk memenuhi kegiatan pemerintahan. Keberhasilan otonomi daerah terlihat dari kemampuan keuangan daerah, jika daerah memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan dapat mengurangi penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan.

**Tabel 2. Perbandingan Realisasi PAD Dengan Pendapatan Transfer
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
2017	Rp23.319.551.898.947,00	Rp58.389.169.195.910,00
2018	Rp20.597.546.126.012,40	Rp59.339.528.057.820,00

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

2019	Rp22.908.062.822.178,40	Rp64.859.324.981.626,00
2020	Rp21.394.531.898.171,00	Rp21.394.531.898.171,00
2021	Rp25.018.097.836.849,30	Rp64.138.564.480.074,00

Sumber: BPK RI-Provinsi Jawa Barat (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 2 diatas, terlihat perbandingan PAD dengan pendapatan transfer Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 yang menunjukkan bahwa penerimaan PAD masih cenderung rendah dan pendapatan transfer yang diterima sangat besar. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat masih belum cukup dalam menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga pemerintah daerah Kabupaten/Kota menggunakan pendapatan transfer sebagai sumber pendapatan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer yang diberikan dari pemerintah pusat/provinsi masih sangat tinggi. Sudah seharusnya dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah di Kabupaten/Kota dapat menggali PAD yang dimilikinya secara optimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisa rasio keuangan. Data yang digunakan data sekunder berupa angka-angka yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat selama lima tahun yakni dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

1) Analisis Kinerja Keuangan Daerah

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer. Rasio kemandirian Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Persentase (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	>25% - 50%	Konsultatif
Sedang	>50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	>75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2007 (dalam Nizwan Zuhri, 2020)

b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini menghitung perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Mahmudi, 2019) :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria Rasio Ketergantungan	Persentase (%)
Sangat Rendah	00,00 – 10,00
Rendah	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,00
Cukup	30,01 – 40,00
Tinggi	40,01 – 50,00
Sangat Tinggi	>50,00

Sumber : Banga, 2017 (dalam Nizwan Zukhri, 2020)

c) Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal menggambarkan sejauh mana keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rasio ini dihitung dengan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rumus untuk mengukur desentralisasi fiskal sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	Persentase (%)
Sangat Efektif	>10,00%
Efektif	>90% - 100%
Cukup Efektif	>80% - 90%
Kurang Efektif	>60% - 80%
Tidak Efektif	≤60%

Sumber : Hanafi, 2005 (dalam Nizwan Zukhri, 2020)

d) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah dianggarkan. Rasio ini dapat dihitung dengan perbandingan realisasi PAD dengan anggaran PAD. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas PAD sebagai berikut (Mahmudi, 2019) :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas PAD	Persentase (%)
Sangat Efektif	>10,00%
Efektif	>90% - 100%
Cukup Efektif	>80% - 90%
Kurang Efektif	>60% - 80%
Tidak Efektif	≤60%

Sumber: (Mahmudi, 2019)

e) **Rasio Efisiensi Belanja Daerah**

Rasio efisiensi belanja daerah digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola anggaran belanja daerah secara hemat. Rasio ini dapat diukur dengan perbandingan realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7. Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	>10,00%
Kurang Efisien	>90% - 100%
Cukup Efisien	>80% - 90%
Efisien	>60% - 80%
Sangat Efisien	≤60%

Sumber: (Mahmudi, 2019)

2) **Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**

a) **Analisis *Share and Growth***

Analisis *share* digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase pendapatan asli daerah dalam membiayai seluruh belanja daerah selama periode waktu tertentu, sehingga memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan Bappenas, 2003 (dalam Hidayat & Handra, 2020) rumus yang digunakan untuk analisis *share* sebagai berikut :

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis *growth* digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yang menekankan kepada pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dari satu periode ke periode berikutnya serta memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Berdasarkan Bappenas, 2003 (dalam Hidayat & Handra, 2020) rumus untuk analisis *growth* sebagai berikut:

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

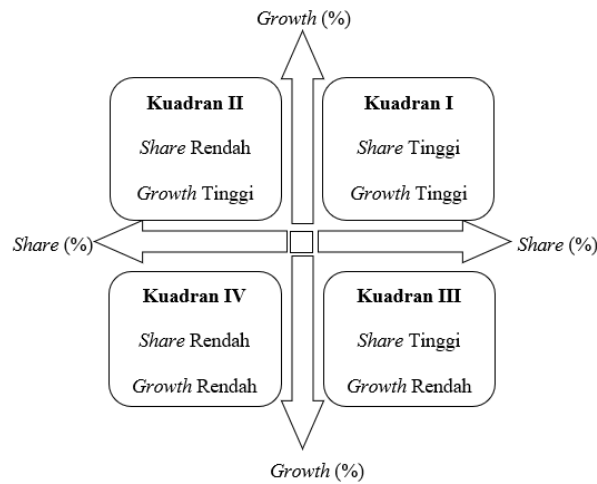
Keterangan :

Growth : Pertumbuhan
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 t : Periode Saat Ini
 t-1 : Periode Sebelumnya

b) **Peta Kemampuan Keuangan Daerah**

Peta kemampuan keuangan daerah merupakan visualisasi yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokalnya. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan metode kuadran yang didasarkan pada hasil perhitungan dari faktor *share and growth*. Melalui metode kuadran, pemerintah dapat mengidentifikasi suatu

daerah dengan jelas mengenai kondisi kemampuan keuangan daerah dan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut (Muhibtari, 2014). Peta kemampuan dan klasifikasi status kemampuan keuangan disajikan sebagai berikut :



Sumber: Bappenas, 2003

Gambar 1. Peta Kemampuan Keuangan *Share and Growth*

Tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran terdiri dari empat kuadran utama, yaitu:

Tabel 8. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini tercermin dalam besarnya nilai sumbangan PAD terhadap total belanja (<i>share</i>) yang tinggi dan pertumbuhan PAD (<i>growth</i>) yang tinggi.
II	Kondisi ini masih belum ideal, tetapi daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang untuk memiliki peran yang besar dalam total belanja. Kondisi ini tercermin dalam besarnya nilai sumbangan PAD terhadap total belanja (<i>share</i>) yang masih rendah namun pertumbuhan PAD (<i>growth</i>) yang tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam total belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD yang kecil. Kondisi ini tercermin dalam besarnya nilai sumbangan PAD terhadap total belanja (<i>share</i>) yang tinggi namun pertumbuhan PAD (<i>growth</i>) yang rendah.

- IV Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam total belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini tercermin dalam besarnya nilai sumbangan PAD terhadap total belanja (*share*) yang rendah dan pertumbuhan PAD (*growth*) rendah.

Sumber: (Bappenas, 2003)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan keuangan suatu entitas, dalam mengelola sumber daya keuangan. IKK memiliki tiga komponen utama, yaitu Indeks Pertumbuhan (*Growth Index*), Indeks Elastisitas (*Elasticity Index*), dan Indeks Share (*Share Index*). Untuk mengukur IKK, nilai maksimum dan minimum ditetapkan pada setiap komponen. Berdasarkan Bappenas, 2003. Masing-masing komponen indeks tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan umum sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X = \frac{X - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}} \times 100\%$$

Selanjutnya Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dirumuskan sebagai berikut :

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3} \times 100\%$$

Keterangan :

X_G = Indeks *Growth* (PAD)

X_E = Indeks Elastisitas (Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

X_S = Indeks *Share* (PAD terhadap Total Belanja)

Tabel 9. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang
0,44 – 1,00	Tinggi

Sumber : (Bappenas, 2003)

Hasil dan Pembahasan

1) Hasil Analisis Kinerja Keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

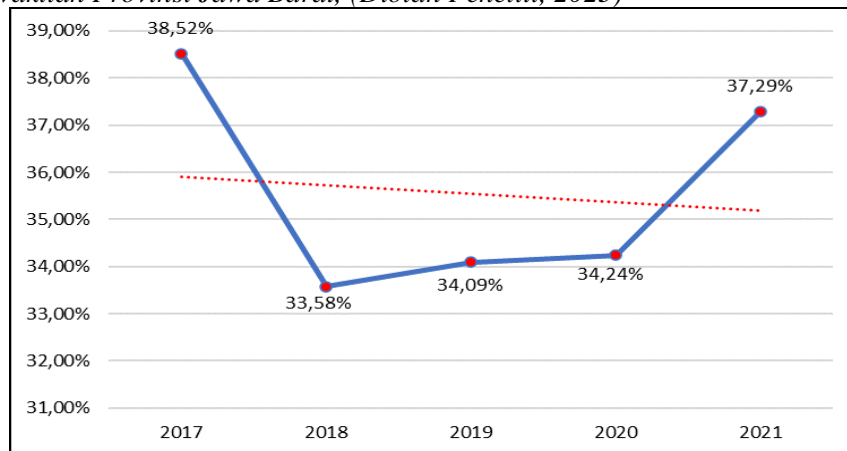
Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan gambaran mengenai seberapa besar capaian kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta memanfaatkan dana yang dimilikinya guna membiayai aktivitas dan kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

Tabel 10. Capaian Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

No	Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	Hasil
1.	Kabupaten Bogor	80,43%	68,82%	70,30%	68,10%	79,54%	73,44%	Partisipatif
2.	Kabupaten Sukabumi	27,42%	19,30%	19,75%	22,48%	21,13%	22,02%	Instruktif

3.	Kabupaten Cianjur	22,26%	23,11%	23,64%	19,48%	26,75%	23,05%	Instruktif
4.	Kabupaten Bandung	26,45%	25,30%	23,80%	28,51%	28,23%	26,46%	Konsultatif
5.	Kabupaten Garut	19,30%	11,72%	12,13%	12,83%	14,82%	14,16%	Instruktif
6.	Kabupaten Tasikmalaya	13,77%	7,92%	8,60%	9,90%	14,01%	10,84%	Instruktif
7.	Kabupaten Ciamis	9,93%	10,53%	10,28%	11,34%	12,06%	10,83%	Instruktif
8.	Kabupaten Kuningan	20,92%	17,05%	16,16%	12,76%	14,97%	16,37%	Instruktif
9.	Kabupaten Cirebon	28,88%	21,20%	20,29%	21,95%	23,38%	23,14%	Instruktif
10.	Kabupaten Majalengka	23,66%	21,19%	18,39%	18,81%	19,04%	20,22%	Instruktif
11.	Kabupaten Sumedang	26,71%	19,67%	18,71%	19,17%	21,05%	21,06%	Instruktif
12.	Kabupaten Indramayu	26,57%	19,00%	19,12%	23,85%	20,28%	21,76%	Instruktif
13.	Kabupaten Subang	25,55%	17,59%	19,22%	19,59%	20,23%	20,44%	Instruktif
14.	Kabupaten Purwakarta	28,16%	22,07%	28,67%	28,87%	29,24%	27,40%	Konsultatif
15.	Kabupaten Karawang	51,92%	42,47%	45,58%	47,15%	54,52%	48,33%	Konsultatif
16.	Kabupaten Bekasi	86,51%	74,82%	82,52%	83,40%	80,90%	81,63%	Delegatif
17.	Kabupaten Bandung Barat	30,39%	20,93%	23,94%	24,86%	26,07%	25,24%	Konsultatif
18.	Kabupaten Pangandaran	7,32%	12,27%	11,50%	7,55%	15,70%	10,87%	Instruktif
19.	Kota Bogor	75,62%	69,99%	69,79%	61,60%	73,50%	70,10%	Partisipatif
20.	Kota Sukabumi	46,78%	45,56%	40,52%	43,99%	40,03%	43,38%	Konsultatif
21.	Kota Bandung	82,22%	77,34%	70,27%	61,56%	64,25%	71,13%	Partisipatif
22.	Kota Cirebon	49,32%	48,72%	48,26%	48,65%	44,37%	47,86%	Konsultatif
23.	Kota Bekasi	71,90%	75,65%	73,36%	72,04%	83,95%	75,38%	Delegatif
24.	Kota Depok	74,80%	61,78%	73,51%	71,80%	89,76%	74,33%	Partisipatif
25.	Kota Cimahi	40,92%	36,57%	38,77%	41,36%	38,47%	39,22%	Konsultatif
26.	Kota Tasikmalaya	24,16%	18,76%	18,49%	22,84%	29,38%	22,73%	Instruktif
27.	Kota Banjar	18,28%	17,45%	14,86%	19,95%	21,09%	18,32%	Instruktif
RATA-RATA		38,52%	33,58%	34,09%	34,24%	37,29%	35,54%	Konsultatif
MINIMUM		7,32%	7,92%	8,60%	7,55%	12,06%	10,83%	Instruktif
MAKSIMUM		86,51%	77,34%	82,52%	83,40%	89,76%	81,63%	Delegatif

Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)



Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

Grafik 1. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat bahwa rata-rata kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 memiliki rata-rata 35,54% masuk ke dalam pola hubungan Konsultatif dimana pemerintah daerah sudah dianggap sedikit lebih sanggup dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga campur tangan dari pemerintah pusat sudah mulai menurun namun pemerintah pusat masih memberikan arahan dan bimbingan, tetapi lebih bersifat konsultatif. Dari 27 kabupaten/kota Se-Provinsi Jawa Barat terdapat 14 daerah dengan kriteria Instruktif, 7 daerah kriteria Konsultatif, 4 daerah kriteria Partisipatif, dan 2 daerah dengan kriteria Delegatif. Rata-rata persentase terbesar berada di daerah Kabupaten Bekasi mencapai 81,63% sedangkan persentase terendah pada daerah Kabupaten Ciamis mencapai 10,83%.

Berdasarkan grafik 1, menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif dan secara garis trend cenderung menurun. Pada tahun 2017 kemandirian keuangan daerah sebesar 38,52%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (-4,94%) dengan persentase kemandirian sebesar 33,58%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,51% dengan persentase kemandirian sebesar 34,09%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,05% dengan persentase kemandirian sebesar 34,24%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,05% dengan persentase kemandirian sebesar 37,29%. Selama lima tahun rata-rata persentase rasio kemandirian keuangan daerah terbesar pada tahun 2017 mencapai 38,52% dan persentase terendah pada tahun 2019 mencapai 34,09%.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

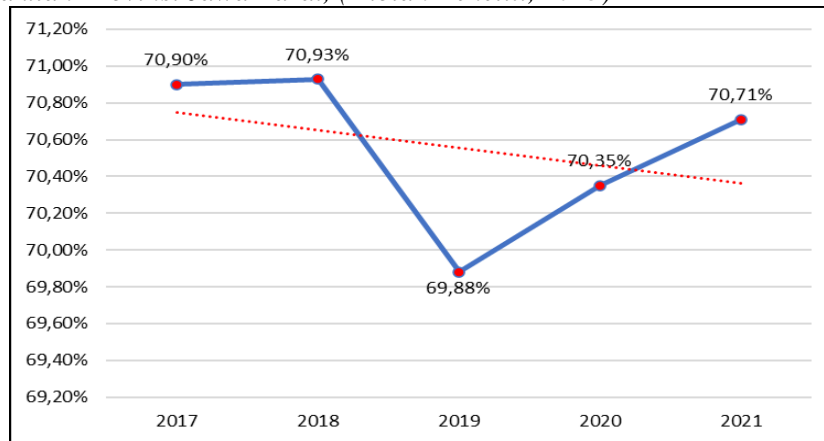
Rasio ketergantungan keuangan daerah memberikan proyeksi pemerintah daerah terhadap ketergantungan dana yang di peroleh dari sumber eksternal (seperti dana perimbangan atau transfer keuangan). Semakin tinggi rasio, semakin besar ketergantungan keuangan daerah pada sumber eksternal. Sebaliknya, semakin rendah rasio, semakin mandiri keuangan daerah dalam mengelola pendapatan dan keuangannya sendiri.

Tabel 11. Capaian Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

No	Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	Kriteria
1.	Kabupaten Bogor	54,22%	55,62%	55,26%	53,68%	51,83%	54,12%	Sangat Tinggi
2.	Kabupaten Sukabumi	77,75%	77,87%	77,24%	74,85%	76,53%	76,85%	Sangat Tinggi
3.	Kabupaten Cianjur	63,89%	61,37%	66,54%	77,14%	73,10%	68,41%	Sangat Tinggi
4.	Kabupaten Bandung	69,71%	69,70%	75,18%	66,87%	67,47%	69,79%	Sangat Tinggi
5.	Kabupaten Garut	81,10%	83,60%	83,67%	82,25%	80,79%	82,28%	Sangat Tinggi
6.	Kabupaten Tasikmalaya	87,89%	88,16%	87,50%	86,03%	82,57%	86,43%	Sangat Tinggi
7.	Kabupaten Ciamis	86,97%	86,53%	87,10%	85,54%	84,85%	86,20%	Sangat Tinggi
8.	Kabupaten Kuningan	70,23%	70,30%	67,88%	84,34%	82,66%	75,08%	Sangat Tinggi
9.	Kabupaten Cirebon	75,12%	74,90%	78,53%	74,51%	73,59%	75,33%	Sangat Tinggi
10.	Kabupaten Majalengka	80,87%	75,37%	80,67%	80,56%	79,85%	79,46%	Sangat Tinggi
11.	Kabupaten Sumedang	77,90%	79,90%	80,71%	79,82%	78,77%	79,42%	Sangat Tinggi
12.	Kabupaten Indramayu	66,26%	66,20%	60,74%	63,87%	77,72%	66,96%	Sangat Tinggi
13.	Kabupaten Subang	79,49%	80,20%	79,14%	78,69%	77,58%	79,02%	Sangat Tinggi
14.	Kabupaten Purwakarta	77,99%	81,12%	67,57%	67,47%	73,41%	73,51%	Sangat Tinggi
15.	Kabupaten Karawang	64,98%	65,75%	63,60%	63,19%	61,19%	63,74%	Sangat Tinggi
16.	Kabupaten Bekasi	53,53%	53,88%	52,11%	51,43%	52,27%	52,65%	Sangat Tinggi
17.	Kabupaten Bandung Barat	73,71%	77,54%	76,00%	73,91%	73,99%	75,03%	Sangat Tinggi
18.	Kabupaten Pangandaran	90,35%	79,69%	67,68%	88,73%	83,74%	82,04%	Sangat Tinggi

19.	Kota Bogor	56,50%	55,97%	56,86%	58,29%	55,32%	56,59%	Sangat Tinggi
20.	Kota Sukabumi	63,10%	64,99%	66,03%	65,48%	69,15%	65,75%	Sangat Tinggi
21.	Kota Bandung	54,68%	55,97%	56,82%	59,40%	58,54%	57,08%	Sangat Tinggi
22.	Kota Cirebon	64,75%	63,53%	58,31%	55,00%	67,11%	61,74%	Sangat Tinggi
23.	Kota Bekasi	58,14%	54,70%	55,82%	55,85%	52,39%	55,38%	Sangat Tinggi
24.	Kota Depok	56,84%	58,34%	54,35%	55,30%	50,42%	55,05%	Sangat Tinggi
25.	Kota Cimahi	63,32%	69,60%	64,95%	62,29%	69,28%	65,89%	Sangat Tinggi
26.	Kota Tasikmalaya	80,54%	81,20%	81,51%	78,16%	74,62%	79,21%	Sangat Tinggi
27.	Kota Banjar	84,55%	83,23%	85,05%	76,85%	80,46%	82,03%	Sangat Tinggi
RATA-RATA		70,90%	70,93%	69,88%	70,35%	70,71%	70,56%	Sangat Tinggi
MINIMUM		53,53%	53,88%	52,11%	51,43%	50,42%	52,65%	Sangat Tinggi
MAKSIMUM		90,35%	88,16%	87,50%	88,73%	84,85%	86,43%	Sangat Tinggi

Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)



Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

Grafik 2. Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021

Berdasarkan tabel 11, dapat dilihat rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 memiliki rata-rata 70,56% masuk ke dalam kriteria Sangat Tinggi yang menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat sangat bergantung terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Dari 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, semuanya masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Rata-rata persentase terbesar berada di daerah Kabupaten Tasikmalaya mencapai 86,43% sedangkan persentase terendah berada di daerah Kabupaten Bogor mencapai 54,12%.

Berdasarkan grafik 2, terlihat perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami fluktuatif secara garis trend cenderung menurun. Pada tahun 2017 ketergantungan keuangan daerah sebesar 70,90%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya dengan persentase ketergantungan sebesar 70,90%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebesar (-1,05%) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya dengan persentase ketergantungan sebesar 70,35%. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya dengan persentase ketergantungan sebesar 70,71%. Selama lima tahun terakhir secara rata-rata persentase terbesar pada tahun 2018 mencapai 70,93% dan terendah pada tahun 2019 mencapai 69,88%.

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

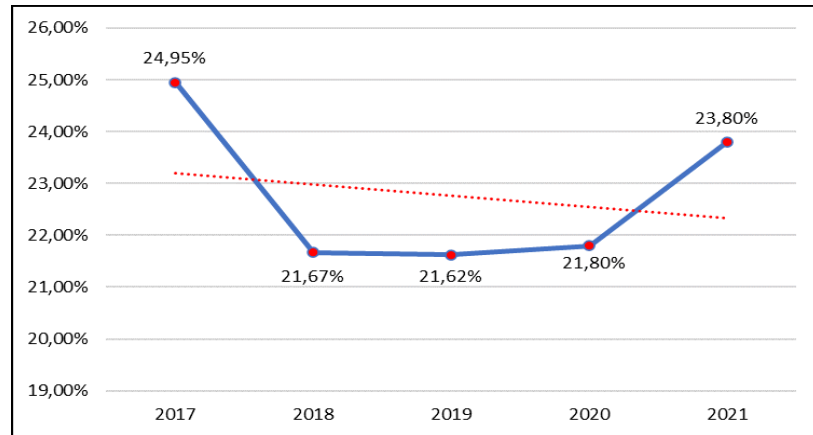
Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

Rasio Desentralisasi Fiskal (DDF) memberikan gambaran seberapa besar capaian kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) pada pemerintah daerah. Rasio ini dihasilkan dari angka realisasi TPD dibagi angka realisasi PAD. Hasil perhitungan rasio DDF sebagai tabel berikut :

Tabel 12. Capaian Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

No	Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	Kriteria
1.	Kabupaten Bogor	43,61%	38,28%	38,84%	36,56%	41,23%	39,70%	Cukup
2.	Kabupaten Sukabumi	21,32%	15,03%	15,25%	16,83%	16,17%	16,92%	Kurang
3.	Kabupaten Cianjur	14,22%	14,18%	15,73%	15,02%	19,55%	15,74%	Kurang
4.	Kabupaten Bandung	18,44%	17,63%	17,89%	19,07%	19,05%	18,42%	Kurang
5.	Kabupaten Garut	15,65%	9,79%	10,15%	10,55%	11,97%	11,62%	Kurang
6.	Kabupaten Tasikmalaya	12,11%	6,98%	7,52%	8,51%	11,57%	9,34%	Sangat Kurang
7.	Kabupaten Ciamis	8,64%	9,12%	8,96%	9,70%	10,23%	9,33%	Sangat Kurang
8.	Kabupaten Kuningan	14,69%	11,99%	10,97%	10,76%	12,38%	12,16%	Kurang
9.	Kabupaten Cirebon	21,70%	15,88%	15,94%	16,35%	17,21%	17,41%	Kurang
10.	Kabupaten Majalengka	19,13%	15,97%	14,84%	15,15%	15,20%	16,06%	Kurang
11.	Kabupaten Sumedang	20,81%	15,72%	15,10%	15,30%	16,58%	16,70%	Kurang
12.	Kabupaten Indramayu	17,61%	12,58%	11,61%	15,23%	15,76%	14,56%	Kurang
13.	Kabupaten Subang	20,31%	14,11%	15,21%	15,41%	15,69%	16,15%	Kurang
14.	Kabupaten Purwakarta	21,96%	17,90%	19,37%	19,48%	21,46%	20,04%	Sedang
15.	Kabupaten Karawang	33,74%	27,92%	28,99%	29,80%	33,36%	30,76%	Cukup
16.	Kabupaten Bekasi	46,31%	40,32%	43,00%	42,89%	42,29%	42,96%	Baik
17.	Kabupaten Bandung Barat	22,40%	16,23%	18,19%	18,37%	19,28%	18,90%	Kurang
18.	Kabupaten Pangandaran	6,61%	9,78%	7,79%	6,70%	13,14%	8,80%	Sangat Kurang
19.	Kota Bogor	42,73%	39,17%	39,69%	35,91%	40,66%	39,63%	Cukup
20.	Kota Sukabumi	29,52%	29,61%	26,76%	28,80%	27,68%	28,47%	Sedang
21.	Kota Bandung	44,96%	43,29%	39,93%	36,57%	37,61%	40,47%	Baik
22.	Kota Cirebon	31,93%	30,95%	28,14%	26,76%	29,78%	29,51%	Sedang
23.	Kota Bekasi	41,80%	41,38%	40,95%	40,24%	43,98%	41,67%	Baik
24.	Kota Depok	42,52%	36,04%	39,95%	39,71%	45,26%	40,70%	Baik
25.	Kota Cimahi	25,91%	25,45%	25,18%	25,77%	26,65%	25,79%	Sedang
26.	Kota Tasikmalaya	19,46%	15,24%	15,07%	17,85%	21,92%	17,91%	Kurang
27.	Kota Banjar	15,45%	14,52%	12,64%	15,33%	16,97%	14,98%	Kurang
RATA-RATA		24,95%	21,67%	21,62%	21,80%	23,80%	22,77%	Sedang
MINIMUM		6,61%	6,98%	7,52%	6,70%	10,23%	8,80%	Sangat Rendah
MAKSIMUM		46,31%	43,29%	43,00%	42,89%	45,26%	42,96%	Tinggi

Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)



Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

Grafik 3. Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021

Berdasarkan tabel 12, dapat dilihat bahwa rata-rata desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 memiliki rata-rata mencapai 22,77% dengan kategori Sedang, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola PAD dari total pendapatan daerah kemampuannya masih sedang. Dari 27 Kabupaten dan Kota terdapat 3 daerah dengan kriteria sangat kurang, 13 dengan kriteria kurang, 4 daerah kriteria sedang, 3 daerah kriteria cukup, 4 daerah kriteria baik, dan tidak ada daerah dengan kriteria sangat baik. Rata-rata persentase terbesar berada di daerah Kota Bekasi yang mencapai 41,67% dan daerah dengan rata-rata persentase terendah berada di Kabupaten Pangandaran mencapai 8,80%.

Berdasarkan grafik 3, dapat diketahui perkembangan rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Secara garis trend rasio desentralisasi fiskal pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 rasio desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat mencapai 24,95%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (-3,28%) dengan desentralisasi mencapai 21,67%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar (-0,74%) dengan desentralisasi mencapai 21,62%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,55% dengan desentralisasi mencapai 21,80%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya sebesar (-1,28%) dengan desentralisasi mencapai 23,80%. Selama lima tahun terakhir rata-rata rasio desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tertinggi berada pada tahun 17 mencapai 24,95% sedangkan terendah pada tahun 2019 mencapai 21,62%.

d. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD mampu memberikan gambaran mengenai seberapa besar capaian dari kapasitas pemerintah dalam mengelola penerimaan PAD sesuai dengan besaran yang telah dianggarkan pada awal penganggaran APBD.

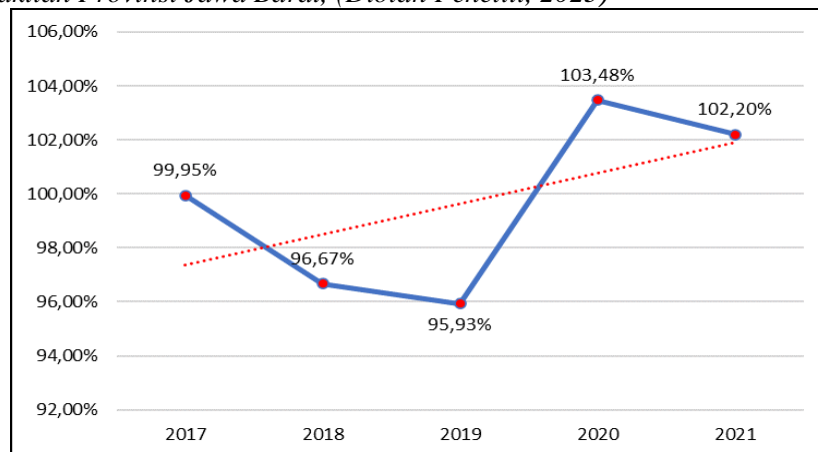
Tabel 13. Capaian Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

No	Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	Kriteria
1.	Kabupaten Bogor	133,26%	112,89%	118,11%	114,11%	114,30%	118,54%	Sangat Efektif
2.	Kabupaten Sukabumi	102,93%	103,62%	103,49%	105,86%	103,78%	103,94%	Sangat Efektif
3.	Kabupaten Cianjur	96,37%	95,20%	96,18%	96,07%	107,41%	98,25%	Efektif
4.	Kabupaten Bandung	114,86%	111,12%	109,38%	114,03%	108,51%	111,58%	Sangat Efektif
5.	Kabupaten Garut	96,82%	92,24%	97,07%	106,23%	113,77%	101,23%	Sangat Efektif
6.	Kabupaten Tasikmalaya	97,20%	100,19%	107,80%	104,42%	87,59%	99,44%	Efektif

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

7.	Kabupaten Ciamis	104,06%	99,46%	108,73%	105,56%	114,56%	106,47%	Sangat Efektif
8.	Kabupaten Kuningan	92,95%	88,03%	86,94%	90,43%	96,02%	90,87%	Efektif
9.	Kabupaten Cirebon	105,80%	102,75%	103,59%	109,13%	109,32%	106,12%	Sangat Efektif
10.	Kabupaten Majalengka	90,62%	100,56%	91,49%	95,02%	88,70%	93,28%	Efektif
11.	Kabupaten Sumedang	105,67%	93,07%	88,13%	98,87%	96,65%	96,48%	Efektif
12.	Kabupaten Indramayu	98,69%	94,40%	97,89%	109,73%	104,59%	101,06%	Sangat Efektif
13.	Kabupaten Subang	105,89%	99,55%	95,12%	98,77%	80,44%	95,95%	Efektif
14.	Kabupaten Purwakarta	56,65%	89,12%	84,07%	91,17%	88,05%	81,81%	Cukup Efektif
15.	Kabupaten Karawang	94,12%	86,71%	99,79%	119,22%	115,74%	103,12%	Sangat Efektif
16.	Kabupaten Bekasi	104,81%	104,75%	113,62%	109,49%	99,67%	106,47%	Sangat Efektif
17.	Kabupaten Bandung Barat	116,60%	108,98%	88,53%	109,52%	92,87%	103,30%	Sangat Efektif
18.	Kabupaten Pangandaran	85,18%	84,71%	79,48%	99,71%	116,55%	93,13%	Efektif
19.	Kota Bogor	106,58%	102,79%	104,45%	117,60%	117,57%	109,80%	Sangat Efektif
20.	Kota Sukabumi	99,40%	102,21%	91,00%	101,65%	111,26%	101,10%	Sangat Efektif
21.	Kota Bandung	85,50%	75,69%	78,35%	91,12%	91,13%	84,36%	Cukup Efektif
22.	Kota Cirebon	94,56%	91,51%	85,00%	87,80%	77,53%	87,28%	Cukup Efektif
23.	Kota Bekasi	84,51%	80,26%	72,99%	97,79%	101,76%	87,46%	Cukup Efektif
24.	Kota Depok	112,29%	105,19%	113,57%	106,49%	113,88%	110,28%	Sangat Efektif
25.	Kota Cimahi	123,45%	102,50%	101,90%	113,21%	116,87%	111,59%	Sangat Efektif
26.	Kota Tasikmalaya	94,59%	94,18%	97,75%	105,34%	98,79%	98,13%	Efektif
27.	Kota Banjar	95,18%	88,47%	75,53%	95,63%	92,07%	89,38%	Cukup Efektif
RATA-RATA		99,95%	96,67%	95,93%	103,48%	102,20%	99,64%	Efektif
MINIMUM		56,65%	75,69%	72,99%	87,80%	77,53%	81,81%	Cukup Efektif
MAKSIMUM		133,2%	112,8%	118,11%	119,22%	117,57%	118,54%	Sangat Efektif

Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)



Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

Grafik 4. Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021

Berdasarkan tabel 13, terlihat bahwa dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2017-2021 adalah 99,64%, persentase tersebut masuk ke kriteria Efektif yang artinya Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat efektif dalam menggunakan PAD yang dianggarkan. Dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat terdapat 14 daerah dengan kategori sangat efektif, 8 daerah kategori efektif,

5 daerah dengan kategori cukup efektif. Rata-rata persentase tertinggi berada di daerah Kabupaten Bogor mencapai 118,54% dan persentase terendah berada di daerah Kabupaten Purwakarta mencapai 81,81%.

Berdasarkan grafik 4, dapat diketahui perkembangan rasio efektivitas PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021 cenderung mengalami penurunan dan kenaikan. Secara garis trend rasio efektivitas PAD pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 rasio Efektivitas PAD mencapai 99,95%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (-3,28%) dengan efektivitas PAD mencapai 96,67%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (-0,74%) dengan persentase efektivitas PAD mencapai 95,93%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,55% dengan rasio efektivitas PAD mencapai 103,48%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (-1,28%) dengan rasio efektivitas PAD mencapai 102,20%. Selama lima tahun terakhir rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tertinggi berada pada tahun 2020 mencapai 103,48% dan terendah pada tahun 2019 mencapai 95,93%.

e. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah memberikan gambaran mengenai capaian pemerintah daerah dalam melakukan penghematan terhadap alokasi anggaran belanja. Hasil dari analisis rasio efisiensi belanja, dapat memberikan informasi mengenai belanja daerah pada tahun anggaran tertentu apakah lebih efisien atau tidak.

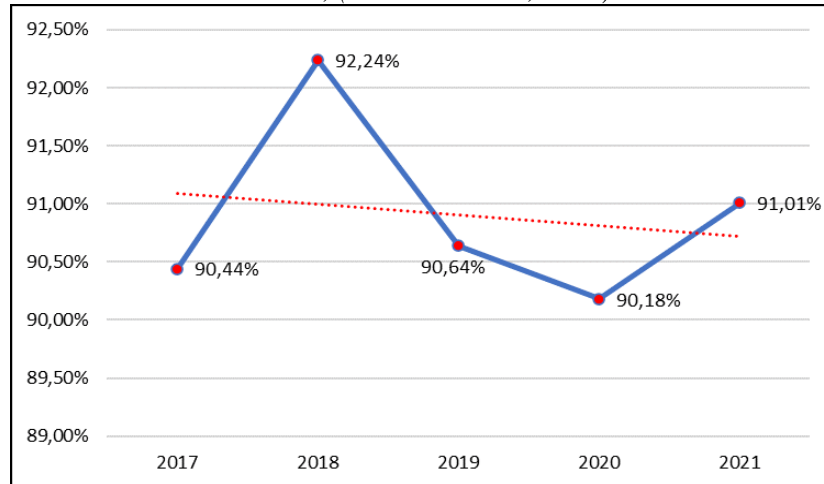
**Tabel 14. Capaian Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Daerah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021**

No	Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	Kriteria
1.	Kabupaten Bogor	92,51%	92,52%	92,53%	94,43%	95,50%	93,50%	Kurang Efisien
2.	Kabupaten Sukabumi	91,28%	93,50%	95,20%	95,47%	96,18%	94,33%	Kurang Efisien
3.	Kabupaten Cianjur	93,88%	93,57%	91,66%	92,57%	93,32%	93,00%	Kurang Efisien
4.	Kabupaten Bandung	89,09%	88,71%	93,26%	91,92%	89,13%	90,42%	Kurang Efisien
5.	Kabupaten Garut	93,96%	94,04%	91,69%	93,34%	94,14%	93,43%	Kurang Efisien
6.	Kabupaten Tasikmalaya	96,43%	120,51%	92,86%	93,22%	93,59%	99,32%	Kurang Efisien
7.	Kabupaten Ciamis	95,90%	99,03%	90,54%	95,56%	92,51%	94,71%	Kurang Efisien
8.	Kabupaten Kuningan	97,18%	96,07%	95,05%	94,84%	96,11%	95,85%	Kurang Efisien
9.	Kabupaten Cirebon	93,33%	91,97%	92,29%	89,09%	92,62%	91,86%	Kurang Efisien
10.	Kabupaten Majalengka	91,11%	93,31%	93,78%	94,24%	95,67%	93,62%	Kurang Efisien
11.	Kabupaten Sumedang	96,08%	93,97%	92,99%	92,98%	91,18%	93,44%	Kurang Efisien
12.	Kabupaten Indramayu	95,11%	95,12%	91,45%	94,08%	91,57%	93,47%	Kurang Efisien
13.	Kabupaten Subang	93,60%	95,39%	94,08%	86,30%	94,34%	92,74%	Kurang Efisien
14.	Kabupaten Purwakarta	82,48%	89,97%	94,29%	92,50%	94,87%	90,82%	Kurang Efisien
15.	Kabupaten Karawang	89,53%	91,50%	93,70%	93,91%	91,38%	92,00%	Kurang Efisien
16.	Kabupaten Bekasi	83,33%	83,91%	86,13%	83,49%	85,48%	84,47%	Cukup Efisien
17.	Kabupaten Bandung Barat	91,82%	92,13%	89,21%	78,58%	85,70%	87,49%	Cukup Efisien
18.	Kabupaten Pangandaran	95,61%	96,32%	90,43%	78,31%	80,62%	88,26%	Cukup Efisien
19.	Kota Bogor	86,45%	90,60%	87,91%	89,13%	92,83%	89,38%	Cukup Efisien
20.	Kota Sukabumi	87,79%	87,11%	87,27%	91,92%	95,08%	89,84%	Cukup Efisien
21.	Kota Bandung	82,06%	82,42%	85,70%	84,71%	86,98%	84,38%	Cukup Efisien
22.	Kota Cirebon	90,00%	90,68%	91,24%	93,70%	80,60%	89,24%	Cukup Efisien
23.	Kota Bekasi	87,27%	87,03%	78,76%	83,13%	88,45%	84,93%	Cukup Efisien

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

24.	Kota Depok	82,57%	78,47%	85,33%	87,14%	88,87%	84,48%	Cukup Efisien
25.	Kota Cimahi	81,82%	88,02%	89,64%	81,35%	79,80%	84,12%	Cukup Efisien
26.	Kota Tasikmalaya	92,85%	96,67%	95,47%	97,34%	96,97%	95,86%	Kurang Efisien
27.	Kota Banjar	88,92%	87,86%	84,80%	91,49%	93,88%	89,39%	Cukup Efisien
RATA-RATA		90,44%	92,24%	90,64%	90,18%	91,01%	90,90%	Kurang Efisien
MINIMUM		81,82%	78,47%	78,76%	78,31%	79,80%	84,12%	Cukup Efisien
MAKSIMUM		97,18%	120,51%	95,47%	97,34%	96,97%	99,32%	Kurang Efisien

Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)



Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

Grafik 5. Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio efisiensi belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 memiliki rata-rata mencapai 90,90%. Menurut (Mahmudi, 2019) pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi jika rasio nya kurang dari 100%, sebaliknya apabila melebihi maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran dan mengatakan bahwa penyerapan anggaran yang terlalu rendah tidak baik karena mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan anggaran. Secara rata-rata persentase efisiensi belanja daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat mencapai 90,90% masuk ke dalam kategori Kurang Efisien yang artinya Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat sudah mampu merealisasikan anggaran dengan baik namun kurang efisien. Dari 27 Kabupaten dan Kota terdapat 16 daerah kategori kurang efisien dan 11 daerah cukup efisien. Rata-rata persentase terbesar berada di daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar 99,32% dan persentase terendah berada di Kota Cimahi sebesar 84,12%.

Berdasarkan grafik 5, dapat diketahui perkembangan secara rata-rata rasio efisiensi belanja daerah mengalami fluktuatif dan secara garis trend cenderung menurun. Pada tahun 2017 rasio efisiensi belanja daerah mencapai 90,44%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,80% dengan efisiensi belanja daerah mencapai 92,24%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (-1,60%) dengan efisiensi belanja daerah mencapai 90,64%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (-0,46%) dengan efisiensi belanja daerah mencapai 90,18%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,83% dengan efisiensi belanja daerah mencapai 91,01%. Selama lima tahun terakhir rasio efisiensi belanja daerah tertinggi pada tahun 2018 mencapai 92,2% dan terendah pada tahun 2020 mencapai 90,18%.

2) Hasil Kemampuan Keuangan Daerah

Share and Growth

Rasio Share

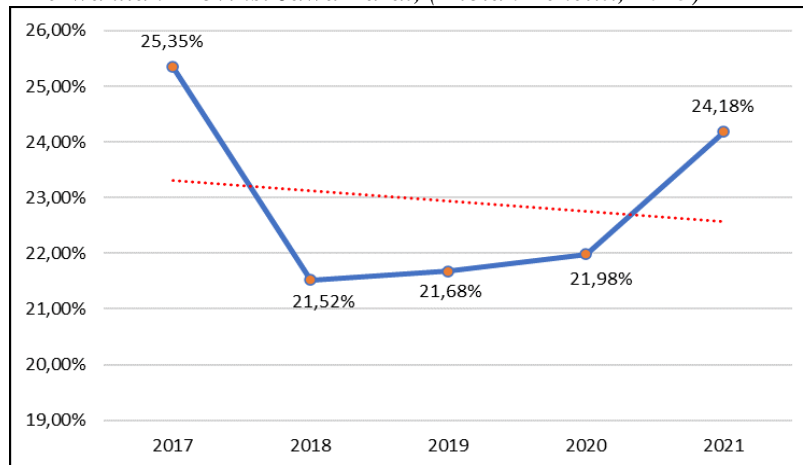
Rasio *Share* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Dengan rasio ini dapat mengetahui *share* atau kontribusi PAD yang diperoleh daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Semakin besar *share* yang diperoleh, menunjukkan bahwa daerah telah dapat mandiri dalam menjalankan otonomi dan tidak tergantung pada bantuan pusat maupun pihak lain dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Dapat dikatakan bahwa daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan mengandalkan pendapatan dari PAD. Perhitungan rasio *share* dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan total belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.

**Tabel 15. Capaian Rata-Rata Rasio *Share* Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021**

No	Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1.	Kabupaten Bogor	44,24%	38,26%	40,68%	33,43%	43,20%	39,96%
2.	Kabupaten Sukabumi	21,76%	14,78%	15,18%	16,41%	16,67%	16,96%
3.	Kabupaten Cianjur	14,61%	14,24%	15,97%	14,76%	20,32%	15,98%
4.	Kabupaten Bandung	19,07%	18,13%	17,73%	18,64%	19,93%	18,70%
5.	Kabupaten Garut	15,84%	9,90%	10,59%	10,38%	12,06%	11,75%
6.	Kabupaten Tasikmalaya	11,77%	7,17%	7,60%	8,30%	11,85%	9,34%
7.	Kabupaten Ciamis	8,83%	9,01%	9,81%	9,53%	10,11%	9,46%
8.	Kabupaten Kuningan	14,62%	12,09%	11,37%	10,68%	12,54%	12,26%
9.	Kabupaten Cirebon	21,66%	15,89%	15,89%	16,69%	17,26%	17,48%
10.	Kabupaten Majalengka	19,47%	16,12%	14,60%	15,22%	15,03%	16,09%
11.	Kabupaten Sumedang	21,10%	16,07%	15,34%	15,49%	17,34%	17,07%
12.	Kabupaten Indramayu	17,48%	12,92%	12,00%	15,24%	16,27%	14,78%
13.	Kabupaten Subang	19,70%	13,67%	15,17%	15,88%	15,85%	16,05%
14.	Kabupaten Purwakarta	23,35%	19,21%	18,43%	19,59%	21,51%	20,42%
15.	Kabupaten Karawang	33,72%	27,10%	29,02%	31,26%	35,37%	31,30%
16.	Kabupaten Bekasi	47,70%	41,41%	43,97%	43,51%	41,08%	43,54%
17.	Kabupaten Bandung Barat	23,62%	15,97%	17,96%	17,61%	18,53%	18,74%
18.	Kabupaten Pangandaran	6,39%	9,57%	7,86%	6,72%	12,98%	8,71%
19.	Kota Bogor	43,56%	37,90%	40,18%	37,03%	40,76%	39,89%
20.	Kota Sukabumi	30,94%	30,55%	25,30%	28,60%	28,67%	28,81%
21.	Kota Bandung	46,53%	42,06%	40,37%	38,17%	38,69%	41,16%
22.	Kota Cirebon	31,50%	30,88%	27,36%	27,62%	30,05%	29,48%
23.	Kota Bekasi	39,91%	40,01%	43,86%	42,80%	44,47%	42,21%
24.	Kota Depok	45,31%	38,32%	40,02%	37,98%	47,04%	41,73%
25.	Kota Cimahi	28,66%	22,50%	24,04%	29,30%	27,34%	26,37%
26.	Kota Tasikmalaya	19,03%	14,62%	15,15%	18,03%	22,12%	17,79%
27.	Kota Banjar	14,16%	12,70%	10,01%	14,65%	15,81%	13,47%
RATA-RATA		25,35%	21,52%	21,68%	21,98%	24,18%	22,94%

MINIMUM	6,39%	7,17%	7,60%	6,72%	10,11%	8,71%
MAKSIMUM	47,70%	42,06%	43,97%	43,51%	47,04%	43,54%

Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)



Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

Grafik 6. Rata-Rata Rasio Share Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

Dari data pada tabel 15 diatas, dapat diketahui rata-rata rasio *share* seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2017-2021 adalah sebesar 22,94%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, keuangan Kabupaten dan Kota keuangan daerah masih cenderung lemah, dimana peran PAD yang diperoleh daerah dalam membiayai pengeluaran daerah masih sangatlah rendah. Secara tidak langsung, data diatas juga dapat menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan lain selain PAD atau rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Rata-rata persentase tertinggi berada di daerah Kabupaten Bekasi mencapai 43,54% dan persentase terendah berada di daerah Kabupaten Pangandaran mencapai 8,71%.

Berdasarkan grafik 6 diatas, dapat diketahui perkembangan secara rata-rata rasio *share* mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih cenderung kecil dan secara garis trend menurun. Pada tahun 2017 rasio *share* pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat sebesar 25,35%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (-3,83%). Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,16% dengan *share* sebesar 21,52%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,30% dengan *share* sebesar 21,98%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,20% dengan *share* sebesar 24,18%. Selama lima tahun rasio *share* tertinggi pada tahun 2017 mencapai 25,35% dan rasio *share* terendah berada pada tahun 2018 mencapai 21,52%.

Rasio Growth

Growth ratio atau rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian ini mengukur pertumbuhan komponen PAD dalam APBD sebagai komponen penting dalam mengukur sejauh mana kemampuan keuangan daerah. Dengan mengetahui sejauh mana pertumbuhan PAD, kemampuan daerah untuk mandiri dengan mengandalkan potensi daerahnya dapat terlihat, serta informasi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan terkait potensi-potensi daerah mana yang memerlukan perhatian lebih jauh.

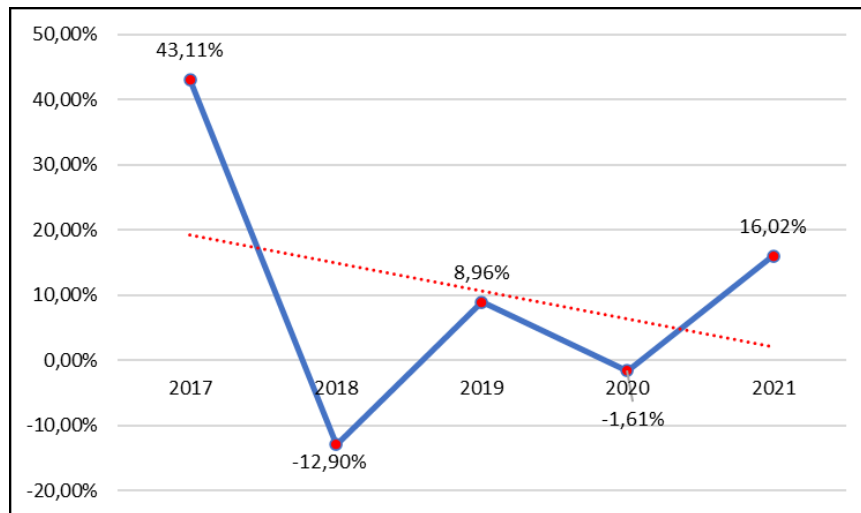
Jika hasil rasio *growth* mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun, maka kinerja keuangan daerah dapat dikatakan baik. Adapun sebaliknya, jika hasil rasio *growth* mengalami penurunan atau negatif, maka keuangan daerah termasuk dalam kategori belum baik. Analisis rasio keuangan *growth* dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021. Tabel berikut merupakan hasil capaian *growth* pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.

Tabel 16. Capaian Rata-Rata Rasio *Growth* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

No	Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1.	Kabupaten Bogor	32,71%	-8,13%	13,11%	-11,10%	33,87%	12,09%
2.	Kabupaten Sukabumi	45,65%	-29,28%	9,63%	6,63%	2,37%	7,00%
3.	Kabupaten Cianjur	17,59%	6,47%	10,30%	-8,20%	37,42%	12,72%
4.	Kabupaten Bandung	142,67%	-1,00%	10,55%	-0,59%	7,52%	31,83%
5.	Kabupaten Garut	79,66%	-39,14%	15,49%	-2,45%	18,15%	14,34%
6.	Kabupaten Tasikmalaya	85,69%	-38,13%	16,05%	6,10%	22,60%	18,46%
7.	Kabupaten Ciamis	8,95%	5,17%	12,65%	-3,82%	7,60%	6,11%
8.	Kabupaten Kuningan	51,67%	-21,12%	-0,60%	-0,89%	15,11%	8,84%
9.	Kabupaten Cirebon	47,31%	-24,96%	9,41%	-3,64%	10,38%	7,70%
10.	Kabupaten Majalengka	54,97%	-12,42%	-2,25%	11,60%	-4,91%	9,40%
11.	Kabupaten Sumedang	60,00%	-21,88%	7,25%	-4,12%	5,82%	9,41%
12.	Kabupaten Indramayu	64,47%	-27,30%	7,19%	12,14%	5,01%	12,30%
13.	Kabupaten Subang	61,34%	-31,12%	15,61%	-0,40%	7,17%	10,52%
14.	Kabupaten Purwakarta	38,51%	-21,93%	13,96%	1,84%	20,48%	10,57%
15.	Kabupaten Karawang	39,36%	-16,36%	15,97%	-3,91%	26,74%	12,36%
16.	Kabupaten Bekasi	20,54%	-9,41%	16,47%	-2,26%	6,71%	6,41%
17.	Kabupaten Bandung Barat	62,12%	-30,75%	25,04%	-11,98%	16,34%	12,15%
18.	Kabupaten Pangandaran	25,92%	33,05%	3,23%	-8,31%	66,35%	24,05%
19.	Kota Bogor	24,79%	-6,75%	11,37%	-14,16%	23,31%	7,71%
20.	Kota Sukabumi	21,60%	0,92%	-8,66%	3,87%	0,19%	3,58%
21.	Kota Bandung	19,77%	-0,27%	-0,91%	-19,01%	6,41%	1,20%
22.	Kota Cirebon	22,26%	-0,79%	-1,41%	0,69%	-8,26%	2,50%
23.	Kota Bekasi	23,70%	0,64%	22,04%	-16,10%	23,81%	10,82%
24.	Kota Depok	31,28%	-12,48%	22,02%	-6,04%	26,51%	12,26%
25.	Kota Cimahi	34,21%	-12,74%	7,74%	4,08%	7,83%	8,23%
26.	Kota Tasikmalaya	39,41%	-21,09%	3,91%	8,02%	41,69%	14,39%
27.	Kota Banjar	7,85%	-7,40%	-13,28%	18,54%	6,43%	2,43%
RATA-RATA		43,11%	-12,90%	8,96%	-1,61%	16,02%	10,72%
MINIMUM		7,85%	-39,14%	-13,28%	-19,01%	-8,26%	1,20%
MAKSIMUM		142,67%	33,05%	25,04%	18,54%	66,35%	31,83%

Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)



Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

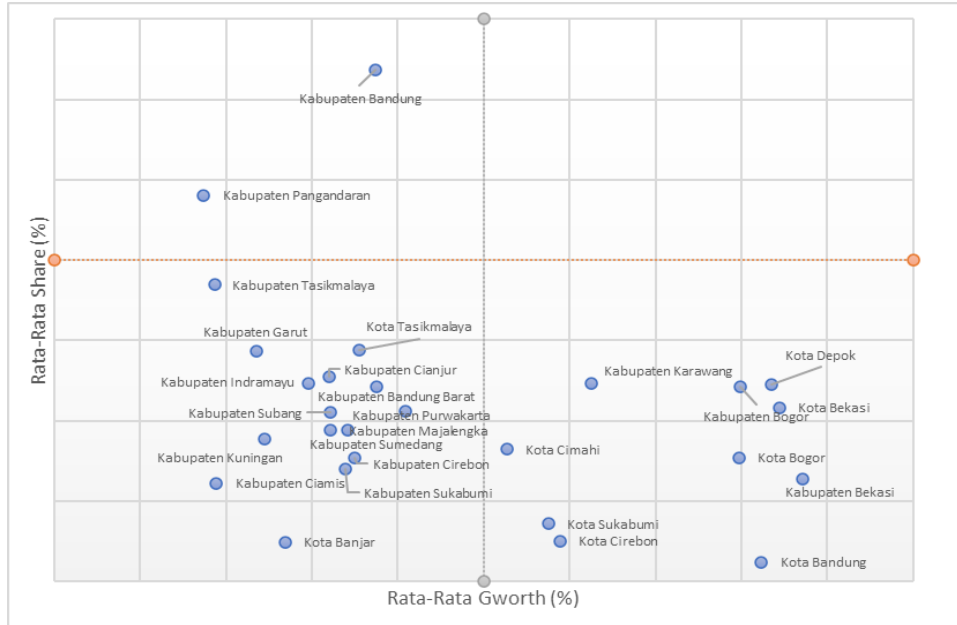
Grafik 7. Rata-Rata Rasio Growth Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

Dari data pada tabel 16 diatas, diketahui bahwa perolehan rata-rata rasio *growth* atau pertumbuhan PAD seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2017-2021 mencapai 5,85%. Hasil perolehan tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan keuangan daerah dalam mempertahankan PAD masih belum baik dan pemerintah daerah belum mampu menjaga kestabilan perolehan PAD dengan memaksimalkan potensi-potensi daerahnya. Sehingga daerah masih perlu meningkatkan dan menjaga kestabilan kinerja keuangan agar tidak mengalami penurunan yang lebih jauh. Rata-rata persentase terbesar berada di daerah Kabupaten Bandung mencapai 31,83% dan daerah dengan rata-rata persentase terendah berada di daerah Kota Bandung mencapai 1,20%.

Berdasarkan grafik 7 diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio *growth* seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan secara garis trend cenderung menurun. Pada tahun 2017 rasio *growth* sebesar 43,11%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan sebesar (-56,01%) dengan persentase rasio *growth* sebesar (-12,90%). Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 21,86% dengan persentase rasio *growth* sebesar 8,96%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar (-10,57%) dengan persentase rasio *growth* sebesar (-1,61%). Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 17,63% dengan persentase rasio *growth* sebesar 16,02%. Selama lima tahun persentase rasio *growth* tertinggi pada tahun 2019 mencapai 8,96% dan persentase rasio *growth* terendah pada tahun 2018 sebesar (-12,90%).

Peta Kemampuan Keuangan (Kuadran)

Peta kemampuan *share and growth* merupakan peta yang dapat menunjukkan seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa selalu menggantungkan diri pada dana dari pemerintah pusat. Peta disusun dengan menggunakan metode kuadran akan menjadi posisi suatu daerah berdasarkan hasil perhitungan *share and growth*. Dengan mengetahui posisi daerah dalam kuadran, dapat diketahui bagaimana kekuatan daerah untuk dapat mandiri dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerahnya. Semakin tinggi posisi daerah dalam kuadran, maka semakin baik keuangan daerah, dan sebaliknya semakin rendah posisi daerah tersebut maka kinerja dapat dikatakan belum cukup baik. Hasil analisis *share and growth* yang telah dilakukan, maka dapat disusun peta kemampuan keuangan sebagai berikut :



Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Grafik 8. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Metode Kuadran

Berdasarkan grafik 8, dapat diketahui kemampuan keuangan selama otonomi daerah melalui peta kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut:

- Tidak ada satu pun daerah yang berada di **KUADRAN I**. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah kurang ideal.
- Dua daerah yang berada di **KUADRAN II** : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan yang rendah, meskipun sebenarnya kabupaten/kota tersebut sudah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal dan PAD-nya memiliki peluang dalam memberikan kontribusi dalam APBD.
- Sepuluh daerah yang berada di **KUADRAN III** : Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang kurang ideal karena PAD memiliki peran yang besar dalam APBD, namun belum didukung dengan pertumbuhan PAD yang besar. Dengan kata lain sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
- Empat Belas daerah yang berada di **KUADRAN IV** : Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah juga belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Dengan kata lain, sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) salah satu indikator yang berfungsi melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. IKK sendiri terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Pertumbuhan (*Growth Index*), Indeks Elastisitas (*Elasticity Index*), dan Indeks Share (*Share Index*). Dalam pengukuran IKK, nilai maksimum dan

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

minimum ditetapkan untuk setiap komponen sebagai parameter evaluasi. Berikut merupakan hasil IKK :

Tabel 17. Capaian Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

No	Pemerintah Daerah	Indeks Share	Indeks Growth	Indeks Elastisitas	IKK	Tingkat Kemampuan Keuangan
1.	Kabupaten Bogor	0,6041	0,3301	0,5320	0,4887	Tinggi
2.	Kabupaten Tasikmalaya	0,4626	0,4926	0,4218	0,4590	Tinggi
3.	Kabupaten Indramayu	0,5076	0,4854	0,3965	0,4632	Tinggi
4.	Kabupaten Subang	0,3956	0,4397	0,4955	0,4436	Tinggi
5.	Kabupaten Purwakarta	0,4045	0,4919	0,6431	0,5131	Tinggi
6.	Kabupaten Karawang	0,5073	0,4278	0,5375	0,4909	Tinggi
7.	Kabupaten Bandung Barat	0,3615	0,4843	0,5589	0,4682	Tinggi
8.	Kota Sukabumi	0,6226	0,5462	0,3960	0,5216	Tinggi
9.	Kota Cirebon	0,5136	0,7070	0,4160	0,5455	Tinggi
10.	Kota Bekasi	0,5047	0,3923	0,5877	0,4949	Tinggi
11.	Kota Depok	0,4146	0,4261	0,5714	0,4707	Tinggi
12.	Kota Cimahi	0,5691	0,5296	0,3684	0,4890	Tinggi
13.	Kota Banjar	0,5957	0,4587	0,2874	0,4473	Tinggi
14.	Kabupaten Sukabumi	0,3121	0,4230	0,4516	0,3956	Sedang
15.	Kabupaten Cianjur	0,2861	0,3317	0,4555	0,3578	Sedang
16.	Kabupaten Bandung	0,4414	0,4363	0,2392	0,3723	Sedang
17.	Kabupaten Garut	0,3123	0,3905	0,4801	0,3943	Sedang
18.	Kabupaten Ciamis	0,4930	0,5326	0,2245	0,4167	Sedang
19.	Kabupaten Kuningan	0,4005	0,3221	0,5098	0,4108	Sedang
20.	Kabupaten Cirebon	0,2758	0,3877	0,5421	0,4019	Sedang
21.	Kabupaten Majalengka	0,3056	0,4383	0,3672	0,3704	Sedang
22.	Kabupaten Sumedang	0,3005	0,3349	0,4684	0,3679	Sedang
23.	Kabupaten Bekasi	0,1704	0,4278	0,5776	0,3919	Sedang
24.	Kota Bogor	0,4375	0,4856	0,2863	0,4031	Sedang
25.	Kota Bandung	0,3583	0,5776	0,3135	0,4165	Sedang
26.	Kota Tasikmalaya	0,4226	0,3453	0,3987	0,3888	Sedang
27.	Kabupaten Pangandaran	0,3511	0,3760	0,2335	0,3202	Rendah
RATA-RATA		0,4197	0,4452	0,4356	0,4335	Tinggi
MINIMUM		0,1704	0,3221	0,2245	0,3202	Rendah
MAKSIMUM		0,6226	0,7070	0,6431	0,5455	Tinggi

Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 17, menunjukkan capaian indeks kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021. Dari 27 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat yang memiliki hasil IKK tinggi berkisaran antara 0,44 – 1,00, terdapat 13 daerah yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar. Daerah yang IKK sedang berkisaran antara 0,34 – 0,43 terdapat 13 daerah yaitu :

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya. Sedangkan daerah dengan IKK rendah hanya 1 daerah dengan kisaran 0,00 – 0,33 yaitu Kabupaten Pangandaran.

Kesimpulan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dan analisis data dari kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan :

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 secara rata-rata kemandirian sebesar 35,54% dengan kategori konsultatif. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki kemandirian yang konsultatif yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang namun hanya bersifat mengarahkan atau konsultatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah : Konsep, Teori dan Penomena di Era Otonomi Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Bappenas. (2003). *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamsiah, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Azkiya Publishing.
- Hanafi, M. M. (2005). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hidayat, M., & Handra, H. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(2), 241–251. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2285>
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2021). Penerapan Otonomi Daerah Masih Temui Banyak Masalah. Diambil 1 Juni 2023, dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=911>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhibtari, N. A. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhemi, G. S. (2015). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, 183–206.
- Sari, I. puspa. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra), 1–14.
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–24, 10.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>